

**PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA AKSI KOLABORATIF AREA MODEL 1:
PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN MERANTI-DANGKU SECARA INKLUSIF**



KEMITRAAN PENGELOLAAN LANSKAP SEMBILANG DANGKU



SEKAPUR SIRIH

Ketika pemerintah menetapkan target 17 juta hektar lebih kawasan hutan harus di “redistribusi” kepada masyarakat desa hutan melalui kebijakan Perhutanan Sosial, sesaat kemudian dunia kehutanan disibukkan dengan hiruk-pikuk pengurusan legalitas lahan kelola masyarakat di dalam kawasan hutan. Pada perkembangannya ribuan petani dengan cepat mendapatkan hak kelola legal di dalam kawasan hutan dengan berbagai skema baik Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Kemitraan maupun Hutan Adat. Untuk kawasan konservasi, masyarakat mendapatkan akses ke dalam kawasan melalui skema kemitraan konservasi.

Kebijakan membuka akses legal masyarakat ke dalam kawasan hutan dilatarbelakangi oleh karakter tata kelola hutan yang selama ini cenderung tertutup bagi masyarakat, hak kelola kawasan hutan banyak diberikan ke perusahaan-perusahaan besar sementara masyarakat desa hutan cenderung dibatasi hak kelolanya. Implikasinya adalah masyarakat hidup miskin di tengah-tengah sumberdaya hutan yang melimpah di sekitar mereka.

Namun melalui kebijakan Perhutanan Sosial ini, nampaknya tata-kelola hutan ke depan akan memberikan peluang bagi peran serta masyarakat. Ini tidak mudah, karena hampir setengah abad masyarakat dijauhkan dari mengenal tata-kelola hutan yang baik. Pengelolaan sumberdaya hutan selama ini cenderung eksklusif hanya di tangan pemerintah dan perusahaan besar. Ke depan pengelolaan hutan harus bersifat inklusif, terbuka dan memberikan kontribusi manfaat kepada banyak pihak, utamanya masyarakat desa hutan. Ini tidak mudah karena persoalan sosial di dalam dan sekitar kawasan hutan sudah terlanjur pelik: lahan illegal, pemukiman illegal, fasilitas umum illegal, masyarakat yang tak jelas identitas kependudukannya, tingkat pendidikan masyarakat rendah, aksesibilitas, dan banyak lagi daftar agenda sosial yang membebani tata-kelola kawasan hutan untuk memenuhi kriteria tata kelola hutan yang baik. Persoalan klasik pun belum juga usai tertangani seperti tata batas kawasan dengan wilayah desa dan juga lahan kritis yang belum tertangani dengan baik. Namun cita-cita mendobrak tata kelola hutan yang eksklusif sudah dicanangkan, tinggal bagaimana semua pihak dapat bersinergi dan bahu-membahu mewujudkan wajah pengelolaan hutan yang lebih inklusif ke depan.

1. GAMBARAN UMUM AREA MODEL 1

1.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Area model ini merupakan salah satu ekosistem hutan yang masih tersisa di Sumatera Selatan. Sebaran kawasan berhutan di area model ini dan sekitarnya sekaligus menunjukkan fragmentasi habitat dan keterancaman populasi mamalia besar seperti harimau sumatera, gajah sumatera, beruang madu dan tapir. Pada bagian utara Area Model ini merupakan kawasan restorasi PT REKI. Kawasan restorasi ekosistem PT REKI dan kawasan konservasi SM Dangku sama-sama menghadapi masalah pembalakan liar, perambahan kawasan, konflik pengelolaan kawasan dan juga konflik manusia dengan satwa liar. Keberadaan KPHP Meranti, yang sebagian besar didominasi oleh kawasan hutan produksi, di antara kedua kawasan tersebut memberikan peluang dan tantangan tersendiri dalam mendorong pihak swasta pemegang ijin konsesi untuk dapat berperan dan terlibat aktif dalam pengembangan koridor konservasi satwa, pelestarian kawasan ekosistem esensial dan juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Kawasan ini tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan masyarakat di dalamnya. Kawasan hutan ini merupakan wilayah-wilayah desa yang masyarakatnya terus mengalami perkembangan dan terus mengalami seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat

Secara geografis Area model 1 berada di daerah hulu dari sungai-sungai yang mengalir ke pesisir timur Sumatera Selatan. Daerah ini didominasi oleh tanah mineral (bukan gambut) meskipun juga ditemui beberapa area rawa gambut didalamnya. Kondisi topografi pada area ini datar dan bergelombang dengan ketinggian antara 20-140 mdpl. Pada Area Model ini mengalir beberapa sungai seperti Sungai Batanghari Leko, Sungai Meranti, Sungai Kedembo dan Sungai Kapas.

1.2. KAWASAN HUTAN DI AREA MODEL 1

Area Model 1 ini meliputi kawasan hutan KPHP Meranti dan Suaka Margasatwa Dangku. KPHP Meranti memiliki luasan 244.162 Ha, yang terdiri dari 134.596 Ha luasan hutan produksi, 97.587 Ha hutan produksi terbatas dan 20.081 Ha hutan lindung. KPHP Meranti berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Dangku seluas 47.996,45 Ha di sebelah timur. KPHP Meranti ditetapkan melalui SK Penetapan No. SK.439/MenhutII/2012 tanggal 09/08/2012. Sedangkan Suaka Margasatwa Dangku ditetapkan berdasarkan



Gambar 1.1. Kondisi tegakan hutan sekunder di Area Model 1 (Lubuk Bintialo). Masyarakat memanfaatkan lahan untuk budidaya karet secara semi intensif

Terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan maupun pertambangan di kawasan ini.

Tabel 1.1. Perusahaan-perusahaan di bidang kehutanan di Area Model 1

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Luas (Ha) Masuk Kedalam Kawasn KPHP
1	PT. Bumi Persada Permai I	IUPHHK-HT	38.187
2	PT. Rimba Hutani Mas	IUPHHK-HT	12.131
3	PT. Pakerin (Tidak Aktif)	IUPHHK-HT	23.375
4	PT. Bumi Persada Permai II	IUPHHK-HT	24.283
5	PT. Sentosa Bahagia Bersama	IUPHHK-HT	53.639
6	PT. Wahana Agro Mulia	IUPHHK-HT	6.547
7	Restorasi Eko Sistem Indonesia	IUPHHK-HA	50.153

Sumber: RPHJP KPH Meranti

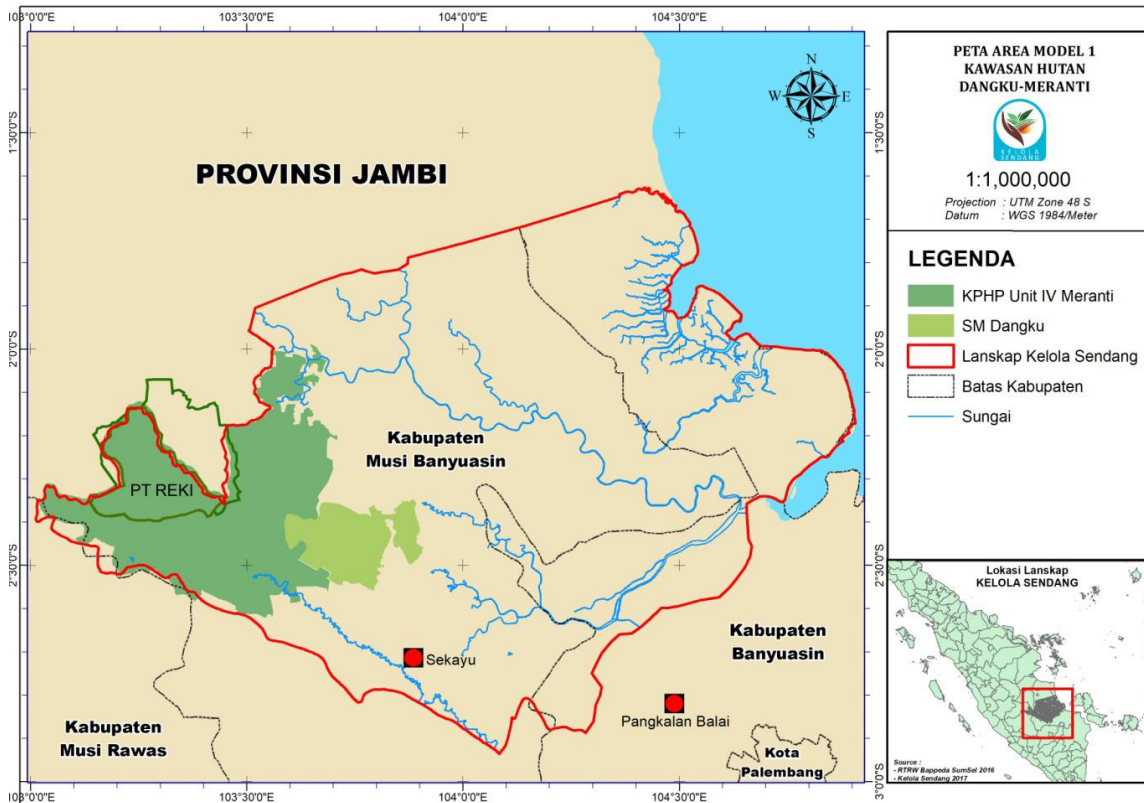
Tabel 1.2. Daftar perusahaan dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam kawasan KPHP Unit IV Meranti

No	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Tahun Ijin	Masa Berlaku (thn)	Kegiatan
Tahap Eksploitasi					
1	PT.Seleraya Merangin Dua	47,98	Februari 2014	19	Eksploitasi minyak bumi
2	Conoco Phillips (Grissik), Ltd	48,59	Agustus 2013	10	Jalan Inspeksi (Jalan Gas Suban - Dayung)
3	ConocoPhillips (Grissik), Ltd	75,88	Januari 2012	11	Pengembangan Lapangan Gas Suban Tahap 2
4	Conoco Phillips (Grissik), Ltd	13,70	Februari 2013	5	Sumur Gas Suban 13 dan 14 Penambahan sumur gas Suban tahap 2
5	ConocoPhillips (Grissik), Ltd	212,59	Februari 2014	9	Pengembangan Lapangan Gas Suban Tahap 1
6	ConocoPhillips (Grissik), Ltd	30,33	Februari 2014	9	Pengembangan Lapangan Gas Sumpal
<i>Tambang Gas</i>		381,09			
Tahap Eksplorasi					
1	PT. Sentosa Kurnia Bahagia	5.500,00	Juli 2010	4	Eksplorasi Tambang Batubara
2	PT. Mensa Bara Bumi	1.477	Januari 2012	2	Eksplorasi Tambang Batubara
3	PT. Persada Makmur Jaya	2.088,00	Mei 2012	2	Eksplorasi Tambang Batubara
4	PT. Lais Coal Mine	1.763,00	Juni 2012	2	Eksplorasi Tambang Batubara
5	PT. Andalan Satria Abadi	4.000,00	Maret 2013	2	Eksplorasi Tambang Batubara
6	PT. Duta Alam Ekapratama	4.000,00	Maret 2013	2	Eksplorasi Tambang Batubara
7	PT. Duta Alam Jaya	4.000,00	Maret 2013	2	Eksplorasi Tambang Batubara
8	PT. Muba Coal Mine	1.989,00	Februari 2013	1	Eksplorasi Tambang Batubara
<i>Tambang Batubara</i>		24.817,00			
Jumlah		25.246,07			

Sumber: BPKH, 2013

1.3. WILAYAH ADMINISTRATIF

Area model ini secara administratif terletak dan berbatasan dengan di 7 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu: Kecamatan Babat Supat, Babat Toman, Batanghari Leko, Bayung Lencir, Lais, Sanga Desa dan Tungkal Jaya.



Gambar 1.2. Posisi geografis Area Model 1 pada lanskap Sembilang Dangkou

1.4. ISU UTAMA DI AREA MODEL 1

1.4.1. Konflik lahan

Konflik peruntukan ataupun pemanfaatan lahan hutan masih banyak terjadi di kawasan ini. Berbagai bentuk konflik lahan yang ada diantaranya adalah:

- Pemanfaatan kawasan hutan untuk pemukiman masyarakat
- Pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola masyarakat tanpa melalui proses legal
- Pemanfaatan kawasan hutan untuk fasilitas umum: sekoah, puskesmas, sarana ibadah
- Tata batas desa
- Konflik lahan masyarakat dengan perusahaan pemegang ijin

Semua kategori konflik diatas masih banyak dijumpai di area model ini sehingga dan membutuhkan upaya-upaya pengelolaan dan resolusi konflik dari pihak-pihak terkait. Konflik lahan yang ada mempunyai beberapa dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak yang muncul sebagai akibat dari

Suaka Margasatwa Dangkou yang menjadi bagian dari Area model 1 juga mengalami konflik pemanfaatan lahan dengan masyarakat dan juga dengan perusahaan. Perambahan terjadi di 4 desa yaitu Desa Sungai Napuh (242 KK), Desa Sungai Petai (555 KK), Desa Sungai Biduk (139 KK), Desa Rebon Jaro (66 KK), sementara itu

dalam hal illegal logging terdapat 6 Sawmill yang beroperasi di sekitar kawasan yang diduga menggunakan bahan baku dari dalam kawasan. Tumpang tindih kawasan ini terjadi antara kawasan SM Dangku dan PT. BSS, PT MBI, PT. PSM PT BTS.¹

1.4.2. Lahan kritis

Secara keseluruhan, lahan dengan klasifikasi sangat kritis seluas 5.872,89 ha (2,41%). Wilayah ini tersebar pada Blok Pemanfaatan IUPHHK-RE (277,16 ha atau 0,11%), Blok HP Pemanfaatan IUPHHK-HT (5.019,50 ha atau 2,06%), Blok HP_Pemberdayaan Wilayah Tertentu (228,04 ha atau 0,09%) dan HP_Perlindungan IUPHHK-HT (349,19 ha atau 0,14%).

Sedangkan lahan dengan klasifikasi kritis berjumlah 11.294,03 ha (4,63%). Lahan kritis ini terdapat di Blok HL Pemanfaatan Wilayah Tertentu (90,17 ha atau 0,04%) dan Blok HP Pemanfaatan IUPHHK-HT (7.904,38 ha atau 3,24%), Blok HP_Pemberdayaan Wilayah Tertentu (2.549,60 ha atau 1,04%) dan HP_Perlindungan IUPHHK-HT (749,88 ha atau 0,31%). (Tabel 1.3.)

Tabel 1.3 Tingkat Kekritisan Lahan di KPHP Unit IV Meranti

Tingkat Kekritisan Lahan	Luas	
	(ha)	(%)
Agak Kritis	1361,47	0,56
Kritis	11294,03	4,63
Potensial Kritis	27094,57	11,10
Sangat Kritis	5872,89	2,41
Tidak Kritis	198539,36	81,31
Jumlah	244162,33	100,00

Sumber: Hasil analisis spasial (2014) dalam RPHJP KPHP Unit Iv Meranti

¹ Potensi dan Permasalahan Pada Wilayah Seksi Konservasi Wilayah I, Disampaikan pada Rapat Kerja Penanganan Gangguan KK Balai KSDA Sumsel, Palembang 09 Maret 2017.



Gambar 1.3. Kondisi lahan kritis di Area Model I di Desa Lubuk Bintialo

1.4.3. Aksesibilitas Desa-Desa Hutan

Seperti diuraikan diatas bahwa di Area model 1 ini terdapat banyak desa-desa yang merupakan bagian wilayah administratif dari kawasan KPHP Meranti dan juga dari Suaka Margasatwa Dangku. Sebagian desa-desa ini umumnya mempunyai kendala aksesibilitas baik di dalam maupun antar desa. Kendala aksesibilitas ini disebabkan adanya hambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan desa maupun jalan antar desa. Jalan-jalan yang ada saat ini masih berada di dalam kawasan hutan dan hal tersebut menghambat penggunaan dana pembangunan daerah APBD Kabupaten untuk mendukung pembangunan jalan. Saat ini masih dipahami bahwa APBD Kabupaten Musi Banyuasin tidak dapat digunakan untuk membangun maupun memperbaiki jalan tersebut. Hal ini menyebabkan biaya transportasi yang mahal bagi masyarakat desa dan akhirnya menghambat perkembangan ekonomi mereka.

1.4.4. Kependudukan

Aspek kependudukan juga masih menjadi kendala bagi masyarakat desa hutan yang ada di Area model 1 ini. Administrasi kependudukan masih belum memadai dan banyak penduduk yang belum mempunyai data kependudukan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- Banyaknya pendatang yang merambah kawasan hutan dan tidak melapor ke pemerintah desa
- Pemukiman yang terpencar-pencar menyulitkan pencatatan penduduk.
- Aksesibilitas yang masih sulit menyebabkan biaya pengurusan yang mahal
- Adanya Suku Anak Dalam yang masih bersifat nomaden

Lemahnya data kependudukan ini sangat berpengaruh pada akses mereka terhadap program-program pemerintah dan layanan pemerintah seperti dalam hal kesehatan dan pendidikan.

1.4.5. Konflik manusia dan satwa

Area model ini mempunyai beragam fungsi kawasan hutan, baik fungsi konservasi, lindung, maupun fungsi produksi. Kawasan konservasi seperti Suaka Margasatwa Dangku dan juga kawasan hutan restorasi yang dikelola PT. REKI diharapkan menjadi tempat berlindung dari berbagai jenis satwa langka seperti Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Beruang Madu, Beruk, Monyet Daun, dll. Namun hal ini tidak selalu selaras dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan juga perusahaan dalam mengembangkan ekonomi maupun produktivitasnya.

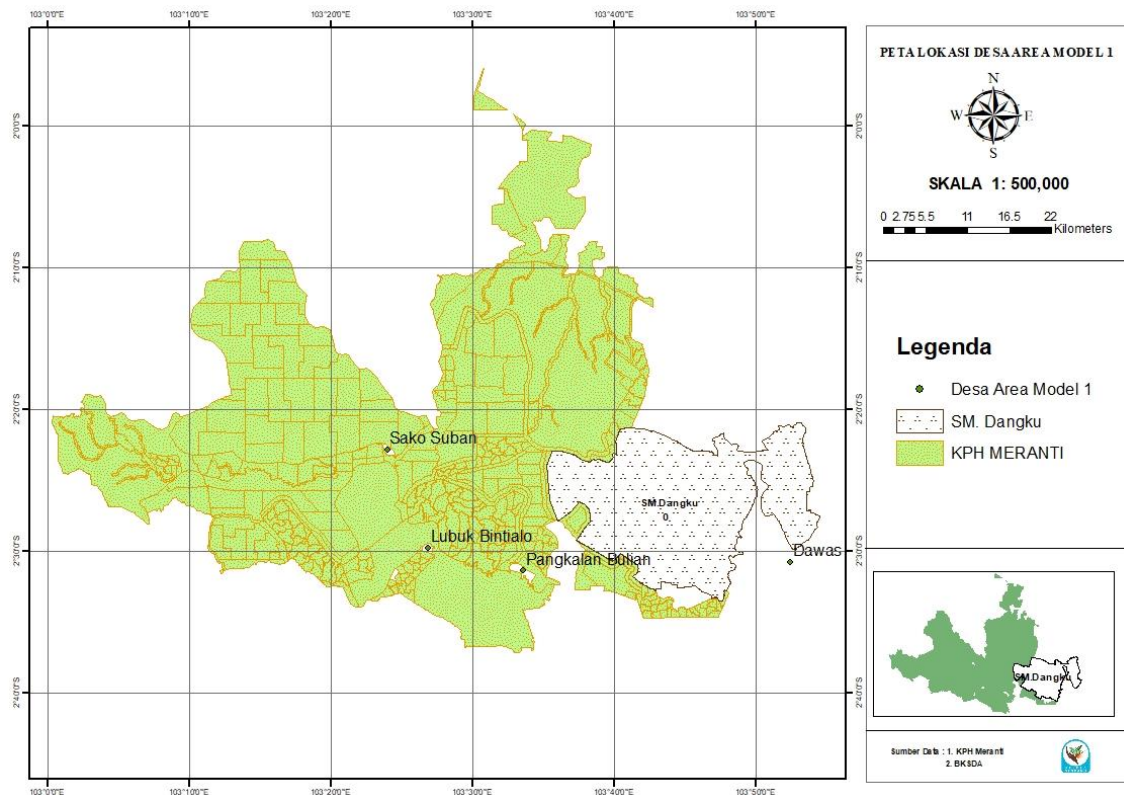
Perambahan kawasan konservasi dan hutan lindung oleh masyarakat terus menekan habitat berbagai satwa langka diatas. Dilain sisi usaha-usaha perusahaan yang cenderung monokultur juga menyebabkan keterbatasan ruang hidup dan sumber-sumber pangan satwa-satwa ini. Masyarakat dan perusahaan juga seringkali menghadapi gangguan dari hewan-hewan liar ini seperti gangguan dari babi hutan, monyet ekor panjang dan juga beruk. Perburuan liar terhadap satwa-satwa langka juga masih sering dilaporkan terjadi di kawasan ini



Gb. 1.4. satu keluarga gajah yang berada di Area model 1

1.5. LOKUS AREA : DESA-DESA MODEL

Sebagai langkah awal dari pengembangan pendekatan lanskap berkelanjutan pada Area Model 1 ini akan difokuskan pada 4 Desa Model, yaitu: Desa Pangkalan Bulian, Lubuk Bintialo, Sako Suban dan Desa Dawas. Posisi desa-desa tersebut di Area Model dapat digambarkan dalam peta berikut ini.



Gambar 1.4. Peta lokasi desa-desa model pada Area model 1

1.6. INISIATIF YANG SEDANG BERKEMBANG

Pada area model ini akan dikembangkan beberapa aksi kolaboratif yang melibatkan pihak pemerintah-masyarakat-swasta yang berdasarkan pada prinsip-prinsip inklusivitas dalam pengelolaan sumberdaya alam, terutama terkait dengan peningkatan peran dan kontribusi pengelolaan kawasan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam arti yang luas. KPH dan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin pengusahaan hutan akan bekerja bersama-sama dengan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Berikut ini adalah informasi tentang beberapa program yang tengah berkembang di Area Model ini.

1.6.1. Perhutanan Sosial

Dalam kerangka Perhutanan Sosial, di wilayah KPHP Meranti telah terbangun dua Hutan Desa, di Desa Lubuk Bintialo seluas 4.992 Ha dengan skema Hutan Tanaman

Rakyat (HTR) dan di Desa Pangkalan Bulian seluas 1.500 Ha dengan skema Kemitraan antara KPH dan Gapoktan.

KPH Meranti mempunyai potensi lahan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dan hal ini dapat dilakukan pada wilayah tertentu di dalam kawasan hutan. Wilayah ini berada di luar area ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dengan luas areal seluas 35.642 ha yang meliputi Blok HL–Pemanfaatan dan Blok HP–Pemberdayaan. Kegiatan ini dilandasi oleh kebijakan pemerintah tentang Perhutanan Sosial. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMENLHK) No. 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Kebijakan ini memberikan pedoman bagi masyarakat yang akan mengelola kawasan hutan dengan menawarkan beberapa skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan juga skema Kemitraan.

Saat ini inisiasi Perhutanan Sosial di KPH Meranti sebenarnya sudah berjalan namun masih membutuhkan dukungan untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Beberapa inisiatif Perhutsos yang tengah dikembangkan di KPH Meranti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4. Inisiatif Perhutanan Sosial di Area Model I

No	Desa	KMPH	Luas	Skema	Keterangan
1.	Pangkalan Bulian	Gapoktan	1500 Ha	Kemitraan	NKK Juni'18
2.	Lubuk Bintlalo	Gapoktan HL	500 Ha	HKm	(ZSL-KS) SK. 7230/MENLHK-PSKL 2018
3.	Lubuk Bintlalo	Gapoktan HP	500 Ha	HTR	Dalam proses (Lingkar Hijau)
4.	Pagar Desa	Gapoktan HP	500 Ha	HTR	Dalam proses (mandiri)
5.	Lubuk Bintlalo	KUD Tunggal Karya Sehati	4922 Ha	HTR	Tahap lobby dengan investor
6.	Pangkalan Bulian	-	2500 Ha	-	Akan diajukan Nov'18
7.	Keban	-	250 Ha	-	Akan diajukan Nov'18
8.	Pagar Desa	-	2500 Ha	-	Akan diajukan Nov'18
9.	Lubuk Bintlalo	-	500 Ha	-	Akan diajukan Nov'18
10.	Dawas		80 Ha	Kemitraan Konservasi	

Dari tabel diatas diketahui bahwa inisiatif Perhutsos yang sedang berkembang di KPH meranti meliputi areal seluas 13.672 ha. Sedangkan saat ini areal tidak terkait dengan perizinan usaha masih sekitar 60.000 ha Sehingga masih terdapat potensi pengembangan Perhutsos kurang lebih seluas 42.000. Pengembangan Perhutsos bukan sekedar membuka akses legal kepada masyarakat terhadap kawasan hutan namun juga harus meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sumberdaya lahan tersebut secara produktif, lestari, dan berkeadilan.

1.6.2. Pemberdayaan dan Pengembangan Perekonomian Masyarakat

Beberapa program sedang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Area Model ini. Program-program CSR yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5. Program Pemberdayaan Ekonomi di Area model 1

No	Desa	Program dan inisiator	Keterangan
1	Lubuk Bintialo	PT. BPP, Demplot Tanaman Kehidupan sistem agroforestry	Blok HP Pemberdayaan Petak HP.46 (Luas 1 Ha)
2.	Desa Tampang Baru	PT. BPP Demplot Tanaman Kehidupan sistem agroforestry	Blok HP Pemberdayaan Petak HP.10 (Luas 1 Ha),

Sumber : Dokumen RPHJpd KPH Meranti Tahun 2017

Program dan inisiatif pemberdayaan dan pengembangan perekonomian diatas belum termasuk yang dikembangkan melalui program dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maupun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.6.3. Restorasi dan Rehabilitasi Lahan

Sebagai akibat dari keberadaan lahan kritis dan juga hutan yang terdegradasi maka di area ini telah berkembang berbagai inisiatif terkait dengan perbaikan tutupan lahan. Inisiatif ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu restorasi untuk di dalam kawasan konservasi dan rehabilitasi lahan untuk diluar kawasan konservasi. Beberapa inisiatif restorasi dan rehabilitasi lahan di dalam Area model 1ni adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6. Inisiatif Rehabilitasi Lahan di Area model 1

No	Inisiator	Program	Luas (Ha)	Keterangan
1.	BKSDA-ZSL	Restorasi melalui Kemitraan Konservasi	80	Desa Dawas
2.	PT. Medco E&P Indonesia Rimau Asset-KPH *	Rehabilitasi DAS	658.83	Desa Lubuk Bintialo ((1. 18.83 Ha Kawasan Hutan Lindung Meranti Sungai Merah Petak 31,33,dan 39 (Tahap Realisasi Penanaman)), ((2. 640 Ha, Kawasan Hutan Lindung Meranti Sungai Merah Petak 34,35,38,39 (Tahap Dalam Proses Pelelangan Tender))
3.	PT.Conocco Philips-KPH*	Rehabilitasi DAS	175	Desa Lubuk Bintialo Kawasan Hutan Lindung Petak

				35,36,37,38 (Tahap Pemeliharaan Tahap Ke -2)
4.	PT. Tropik Energi Pandan-KPH*	Rehabilitasi DAS	4.5	Desa Lubuk Bintialo, Kawasan Hutan Lindung Meranti Sungai Merah Petak 31 (Tahap Pemeliharaan Tahap Akhir)
5.	PT.PLN Persero-KPH*	Rehabilitasi DAS	3	Desa Lubuk Bintialo, Kawasan Hutan Lindung Meranti Sungai Merah Petak 31 (Tahap Pemeliharaan Tahap Akhir)
6.	Yayasan Belantara Indonesia-KPH*	Kerjasama Rehabilitasi	25	Desa Lubuk Bintialo, Kawasan Hutan Lindung Meranti Sungai Merah Petak 33,34 (Tahap Pemeliharaan)
7.	GIZ-KPH*	Rehabilitasi Lahan Kritis Bekas Terbakar	2	Desa Pangkalan Bulian, Kawasan Hutan Lindung Meranti Sungai Merah Petak 73 (Tahap Perlindungan dan Pengamanan)

*Sumber : Dokumen Tabel Realisasi 2018 Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan KPH Meranti

1.6.4. Resolusi Konflik dan Pemetaan Desa

Inisiatif resolusi konflik maupun pemetaan wilayah desa telah diupayakan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga pemerintah daerah. Berikut ini adalah inisiatif resolusi konflik yang ada di Area model 1

Tabel 1.7. Inisiatif/program Resolusi Konflik dan Pemetaan Desa di Area Model 1

Desa	Program	Inisiator	keterangan
Lubuk Bintialo	Resolusi konflik	P2KA	Konflik batas desa
Pangkalan Bulian	Pemetaan batas desa dan tataguna lahan (CLUP)	ZSL- Yayasan Puter	
Sako Suban	Pemetaan batas desa dan tataguna lahan (CLUP)	ZSL- Yayasan Puter	
	Resolusi Konflik	HaKI	

2. PROSES PENYUSUNAN PROGRAM PRIORITAS AREA MODEL 1

2.1. SOSIALISASI KONSEP AWAL

Pada tahap ini Tim ZSL Kelola sendang menyampaikan beberapa alternatif program prioritas yang dapat dikembangkan di Area model 1, diantaranya adalah:

- Penguatan Kelembagaan Perhutsos
- Pengembangan BLUD
- Rehabilitasi dan Restorasi Kolaboratif
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pendekatan Bisnis Inklusif
- Pemberdayaan Suku Anak Dalam/Wong Kubu



Gambar 2.1. Diskusi awal perumusan program prioritas AM 1 pada tanggal 9 Mei 2019 di RM Pondok Kelapo, Palembang.

Acara diskusi awal ini diikuti oleh Kepala Dinas Kehutanan, KKPH Meranti, Perwakilan Forum DAS, LSM HaKI, dan perwakilan dari ZSL-Kelola Sendang. Berdasarkan diskusi yang berkembang pada acara ini maka disimpulkan bahwa semua usulan program dapat diterima namun perlu dilengkapi dengan data yang lebih komprehensif. Selain itu juga perlu dipikirkan 1 atau 2 program yang akan dijalankan sebagai langkah awal

2.2. PERTEMUAN MULTIPIHAK AREA MODEL 1

.Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari KPH Meranti, BKSDA Sumatera Selatan, Masyarakat Desa Lubuk Bintialo, Pangkalan Bulian, dan juga dari Desa Dawas. Pihak LSM yang hadir adalah dari HaKI dan Yayasan DEPATI. Hadir pula perwakilan dari Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.



Gambar 2.2. Pertemuan multipihak Area Model 1 oleh forum Dangku-Meranti, Palembang 14 Mei 2019 di Hotel Santika Radial.

Pada pertemuan multipihak ini isu yang dibahas berkembang dari materi awal yang telah disusun. Beberapa isu yang berkembang pada pertemuan kali ini adalah:

- Kebutuhan aksesibilitas masyarakat
- Kebutuhan tentang legalitas lahan kelola masyarakat
- Kebutuhan tentang contoh praktek pengelolaan lahan yang ramah lingkungan
- Kebutuhan data dan strategi pemberdayaan masyarakat Suku Anak Dalam (*wong kubu*)

2.3. LOKAKARYA DESA AREA MODEL 1

Acara ini diselenggarakan di Hotel Ranggonang, Sekayu. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari 4 desa model yaitu: Desa Sako Suban, Desa Lubuk Bintlalo, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Dawas. Perwakilan desa terdiri dari pemerintah desa, Kelompok Tani, pemuda dan juga dari kelompok perempuan. Acara ini dibuka oleh Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten MUBA.



Gambar 2.3. Lokakarya Desa Area model 1, pada tanggal 19 Juni 2019 di Hotel Ranggonang

Pada acara ini masing-masing desa diberi kesempatan untuk melakukan diskusi internal untuk membahas potensi dan persoalan di desa-desa masing-masing. Potensi dan persoalan ini dikelompokkan ke dalam ruang lingkup sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Secara umum desa-desa yang ada di Area model 1 ini mempunyai karakteristik persoalan yang sama. Secara sosial diperlukan perbaikan dalam hal kepastian wilayah administratif desa dan data kependudukan. Secara ekonomi, ada hambatan terkait legalitas lahan, kemampuan skill produksi masyarakat, inovasi produk, dan pemasaran. Sedangkan dari aspek lingkungan hidup persoalan yang mengemuka adalah turunnya kualitas perairan sungai.

2.4. PERTEMUAN MULTIPIHAK PERUMUSAN PROGRAM PRIORITAS AM 1

Pertemuan di lakukan di Hotel The Zuri Palembang dan bersamaan dengan pertemuan area model yan lain (AM 2 dan AM 3). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari KPH, BKSDA Sumsel, Dinas Kehutanan, Perwakilan 4 Desa Model, Yayasan Puter, Perusahaan Swasta (SBB dan BSS). Dalam pertemuan ini ditetapkan beberapa program prioritas dan juga peta peran aktor di masing-masing desa model. Hasil dari pertemuan ini adalah ditetapkannya program prioritas di Area model 1, yaitu:

1. Perbaikan aspek kependudukan dan Pendidikan masyarakat desa hutan
2. Pengurusan akses lahan legal masyarakat desa hutan
3. Penguatan penghidupan masyarakat desa hutan
4. Rehabilitasi lahan dan konservasi sungai secara partisipatif



Gambar 2.4. Pertemuan Multipihak Area Model 1 untuk merumuskan dan menetapkan Program Prioritas di Area Model 1, 26 Juni 2019 di Palembang

3. PROGRAM PRIORITAS dan RENCANA AKSI KOLABORATIF AREA MODEL 1

Berdasarkan hasil serangkaian diskusi dengan parapihak di Area model 1 yang dilanjutkan dengan dengan perumusan kesepakatan pada tanggal 26 Juni 2019 di Hotel The Zuri Palembang, maka telah ditetapkan program prioritas di Area model 1 adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan Aspek Kependudukan Dan Pendidikan Masyarakat Desa Hutan
2. Pengurusan Akses Lahan Legal Masyarakat Desa Hutan
3. Penguatan Penghidupan Masyarakat Desa Hutan
4. Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Sungai Secara Partisipatif

Selanjutnya berdasarkan program-program yang telah ditetapkan dan disepakati tersebut akan didusun aksi-aksi kolaboratif yang lebih detail dan lebih implementatif.

3.1. PERBAIKAN ASPEK KEPENDUDUKAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA HUTAN;

Perbaikan aspek kependudukan terutama tentang data kependudukan masih diperlukan oleh masyarakat desa yang tinggal di kawasan Area model 1 ini. Program ini bertujuan untuk memperbaiki data kependudukan yang ada di desa, selain itu juga bertujuan untuk membantu masyarakat pendatang yang ada di desa dan tinggal di kawasan hutan untuk mendapat status kependudukan yang jelas.

Aspek pendidikan juga merupakan permasalahan yang krusial karena banyak masyarakat desa hutan yang tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan secara memadai. Pembangunan fasilitas pendidikan terbatas karena keterbatasan lahan yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa kawasan hutan tidak dapat dipakai untuk pembangunan sarana dan fasilitas tersebut, kecuali dengan mekanisme tertentu. Program prioritas ini diharapkan mampu menawarkan inovasi penyediaan fasilitas pendidikan ditengah-tengah keterbatasan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan itu sendiri. Untuk menjalankan program ini akan dijalankan dengan mengembangkan 2 aksi kolaboratif, yaitu:

1. Pendampingan Pembuatan KK dan KTP, dan
2. Inovasi Penyediaan Fasilitas Pendidikan

3.1.1. Pendampingan Pembuatan KK dan KTP

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memilikinya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola warganya. Selain membantu masyarakat dalam hal administrasi kependudukan, pembuatan KK dan KTP ini akan membantu pihak KPH dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti Perhutanan Sosial.

Dalam hal ini akan dipilih desa prioritas atau desa percontohan untuk pembuatan KK dan KTP ini. Desa yang mengalami permasalahan ini cukup pelik adalah Desa Dawas dan Desa Sako Suban. Beberapa hal yang menjadi perhatian khusus dari kegiatan ini adalah:

- Keberterimaan masyarakat dan pemerintah desa terhadap penduduk pendatang
- Kemauan masyarakat pendatang untuk menjadi penduduk desa yang baru
- Kerjasama dengan pemerintah desa asal

Oleh karena itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Meminta dukungan dari OPD yang mempunyai tupoksi khusus dalam bidang kependudukan, dalam hal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin
- Melakukan koordinasi di tingkat tapak dengan pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa
- Melakukan survey bersama secara partisipatif
- Menyusun langkah-langkah pengurusan dan membentuk tim pelaksana
- Melakukan pengurusan KTP sesuai dengan rencana kerja yang disusun dan disepakati bersama

Output dari rencana aksi ini adalah meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan kejelasan status berdasarkan penerbitan KK atau KTP.

3.1.2. Inovasi Penyediaan Fasilitas Pendidikan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat desa hutan yang memerlukan, untuk mengatasi keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan. Bentuk inovasi yang ditawarkan adalah:

- Menggunakan rumah penduduk sebagai tempat sekolah
- Menggunakan bangunan sederhana semi permanen di dalam kawasan sebagai fasilitas sekolah, misalnya hal ini dipadukan dengan aula kelompok tani perhutanan sosial.
- Tenaga pengajar diambilkan dari warga setempat yang mampu memberikan pengajaran
- Untuk legalitas proses pendidikan dapat dilakukan dengan berafiliasi (filial) dengan sekolah terdekat sesuai dengan jenjang pendidikan yang dikembangkan

Inovasi dalam hal layanan pendidikan ini memerlukan kerjasama banyak pihak, baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan juga pihak KPH Meranti jika dibutuhkan akses terhadap kawasan hutan. Pihak perusahaan juga diharapkan dapat membantu dalam hal pengadaan peralatan pendidikan seperti buku ajar dan alat tulis. Kebutuhan honor tenaga pengajar juga dapat dibantu dan didukung oleh perusahaan.

OUTPUT Angka Partisipasi Sekolah

3.2. PENGURUSAN ASPEK LEGALITAS LAHAN MASYARAKAT DESA HUTAN;

Lahan budidaya warga desa seringkali bersentuhan dengan kawasan hutan dimana memperlumaskan sejarah penguasaan lahan akan memicu perdebatan yang tiada ujung. Parapihak yang mewakili warga desa dan pengelola kawasan hutan perlu difasilitasi untuk menemukan sinergi pengelolaan lahan dalam skema kerjasama yang memungkinkan diraihnya solusi bersama untuk penghidupan warga desa dan untuk tujuan-tujuan pengelolaan kawasan hutan secara lestari.

Pengurusan legalitas lahan ini mempunyai beberapa dimensi permasalahan, baik terkait kultural, sosial maupun struktural. Secara teknis, jika didetailkan maka persoalan legalitas lahan ini akan mempunyai beberapa kategori permasalahan legalitas, yaitu:

- Legalitas wilayah administrasi desa
- Legalitas lahan pemukiman
- Legalitas lokasi fasilitas umum, seperti sekolah, Puskesmas, tempat ibadah, dll
- Legalitas lahan kelola, baik berupa hutan dan kebun

Untuk itu perlu dikembangkan program dan kegiatan untuk mengatasi berbagai persoalan di atas. Jika permasalahan-permasalahan dapat diatasi maka hal tersebut akan dapat mendukung pengembangan kehidupan masyarakat dan tata kelola hutan yang lebih baik di masa yang akan datang.

3.2.1. Pemetaan Batas Desa

Desa-desanya penyangga kawasan hutan perlu diperkuat legalitas lahannya dengan kegiatan pemetaan batas desa. Hal ini bersesuaian dengan UU Desa/2014 yang menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa batas wilayah yang jelas juga akan membatasi masyarakat dalam memahami potensi yang dimiliki desa dan juga masalah-masalah yang perlu diatasi.

Dalam hal ini desa-desa di Area Model 1 masih belum mempunyai kejelasan kewilayahan secara spasial. batas-batas desa masih belum ditentukan atau disepakati secara definitif. Oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk menata kewilayahan desa ini. Dalam hal ini program KELOLA Sendang telah memulai dengan membuat pemetaan di tingkat tapak dengan melakukan pemetaan secara partisipatif. Hingga saat ini telah menghasilkan beberapa peta desa. Namun hal ini perlu ditindaklanjuti dengan proses legalisasi peta sehingga peta yang dihasilkan mempunyai landasan hukum yang jelas dan dapat digunakan dalam kepentingan yang bersifat legal formal. Adapun proses yang akan ditempuh dalam hal ini adalah:

- Koordinasi dengan pihak-pihak berwenang di tingkat kabupaten
- Pemetaan lapangan
- Fasilitasi dan mediasi konflik
- Pengurusan peta secara legal formal
- Penerbitan peta oleh pihak yang berwenang

Desa-desa yang akan difasilitasi oleh inisiatif ini adalah Desa Pangkalan Bulian, Desa Lubuk Bintlalo dan Desa Sako Suban. Desa-desa ini tengah difasilitasi oleh KELOLA Sendang dalam menyusun dan membuat peta secara partisipatif. Output dari kegiatan ini adalah peta batas desa.

3.2.2. Pemetaan Tata Guna Lahan Desa

Selain pemetaan batas wilayah desa perlu juga memetakan kondisi penggunaan lahan desa yang terjadi saat ini. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran atau informasi tentang pola penggunaan lahan desa saat ini dan status legalitas pemukiman dan juga fasilitas umum yang saat ini berada di desa. Selain itu juga akan berisi rencana penggunaan ruang di masa yang akan datang (*Community Land Use*

Planning). Jika ada permasalahan maka peta ini dapat digunakan sebagai dasar dari pengurusan legalitas ke depan. Output dari kegiatan ini adalah data spasial atau pola penggunaan saat ini dan rencana pengembangannya.

3.2.3. Pengurusan Legalitas Lahan Kelola Melalui Perhutanan Sosial

Hingga kini, pemerintah memiliki 2 agenda besar terkait dengan pengelolaan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Melihat tujuan ini, pemerintah telah menyiapkan sebuah program yang memastikan bahwa pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya di sekitar hutan dapat dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan pelestarian lingkungan. Program ini adalah Program Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan hutan kepada pemerintah. Setelah usulan disetujui, masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan ini, masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola areal yang mereka ajukan.

Di Area model 1 telah dirintis pelaksanaan dari program Perhutanan Sosial ini. Program ini akan dapat terus berkembang nantinya seiring dengan aspirasi dan keinginan masyarakat dalam mengusulkan kawasan yang akan mereka kelola. Inisiatif tentang Perhutanan Sosial ini akan dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- sosialisasi program Perhutsos kepada masyarakat dan pemerintah desa
- Koordinasi pihak-pihak terkait dalam pengurusan ijin
- Pendampingan kelompok dalam pengurusan ijin Perhutsos

Output dari kegiatan ini adalah dokumen usulan pengurusan legalitas pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat desa.

3.3. PENGUATAN ASPEK PENGHIDUPAN MASYARAKAT DESA HUTAN;

Masyarakat yang hidup di dalam wilayah desa hutan di Area model 1 masih membutuhkan peningkatan kemampuan mereka dalam hal mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber kehidupan yang ada di sekitar mereka. Hal ini dikarenakan pola dan cara pemanfaatan sumber kehidupan mereka saat ini masih sangat terbatas dan belum banyak menghasilkan variasi pendapatan bagi keluarga. Penguatan penghidupan masyarakat ini akan dilaksanakan melalui beberapa inisiatif, yaitu:

1. Pengembangan Pola Agroforestry dan *Integrated Farming*
2. Pengembangan Usaha Berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu

3. Penguatan Akses Pasar

3.3.1. Pengembangan Pola Agroforestry dan *Integrated Farming*

Saat ini masyarakat di Area model 1 ini masih sangat tergantung dengan 2 komoditi utama, yaitu sawit dan karet. Hal ini menyebabkan perekonomian masyarakat juga sangat tergantung dengan fluktuasi harga kedua komoditi tersebut. Masyarakat juga masih memiliki ketergantungan dengan peluang kerja pada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar mereka, padahal daya serap perusahaan juga terbatas. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan (kapasitas) masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di sekitar mereka. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan pola agroforestry. Pola pengembangan agroforestry ini akan dilakukan dengan membangun petak-petak percontohan (*demonstration plot*). Akan dibangun beberapa petak percontohan dengan beberapa tujuan khusus, yaitu:

- Agroforestry untuk pengembangan peternakan
- Agroforestry dengan pengkayaan tanaman bawah tegakan (jahe, kapulaga, cabe jawa, dll)
- Pola Agroforestry untuk pengkayaan tanaman pangan
- Dll, sesuai dengan kondisi masing-masing lokasi

Petak percontohan ini nantinya akan dikembangkan oleh KPH dan bekerjasama dengan masyarakat, pemerintah desa dan dinas-dinas terkait. Output dari kegiatan ini adalah 1 unit demplot agroforestry yang dikelola KPH dan 1 unit demplot agroforestry yang dikelola oleh masyarakat.

3.3.2. Pengembangan Usaha Berbasis HHBK (madu)

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus untuk menjaga hutan untuk tetap lestari. Salah satu potensi Hasil Hutan Bukan Kayu yang dapat dikembangkan adalah madu hutan. Terdapat dua jenis madu yang dapat dikembangkan, yaitu madu sialang (madu yang dihasilkan oleh lebah yang bersarang pada pohon sialang) dan juga madu "klulut", yaitu madu yang dihasilkan oleh lebah klulut, yaitu jenis lebah yang berukuran kecil dan tidak mempunyai sengat (*stingless bee*). Upaya ini telah diinisiasi oleh ZSL di Desa Lubuk Bintialo dan akan terus dikembangkan.

Pengembangan ini nantinya akan menghasilkan output berupa 1 unit kebun koleksi beragam lebah klulut (*Stingless Bee*) yang merupakan langkah awal bagi proses budidaya ke depan.

3.3.3. Penguatan Akses Pasar

Penguatan akses pasar ini akan dilakukan melalui perbaikan aspek rantai pasok. Melalui strategi ini diharapkan petani mampu mengembangkan dan memperkuat sistem kelembagaan mereka. Kelembagaan ini nanti akan mempunyai fungsi utama sebagai lembaga pemasaran yang mampu memperbaiki rantai pasok komoditi yang dipasarkan petani sehingga petani akan memperoleh harga komoditi yang lebih baik. Inisiatif ini telah dimulai oleh SNV di Desa Lubuk Bintialo dan dapat dikembangkan di desa-desa lain di Area model 1.

Inisiatif ini akan menghasilkan beberapa output utama, yaitu:

- Peningkatan kemampuan/ketrampilan petani
- Peningkatan kualitas produksi dan produktifitas lahan, dan
- Perbaikan harga komoditi

3.4. REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI SUNGAI SECARA PARTISIPATIF:

Terdapat lahan kritis yang masih cukup luas di Area model 1, baik di dalam kawasan KPH Meranti maupun di dalam kawasan SM Dangku. Selain itu sempadan sungai juga perlu diperhatikan dan diawasi. Jika dilihat dari kondisi sungai-sungai yang semakin keruh dan berkurangnya populasi ikan di sungai. Rehabilitasi lahan terutama Dalam jangka pendek upaya ini akan difokuskan pada dua kegiatan, yaitu:

3.4.1. Restorasi Kawasan Suaka Margasatwa Dangku Melalui Skema Kemitraan Konservasi

Inisiatif ini sudah dimulai di Desa Dawas di Dusun Sungai Petai. Hingga saat ini telah terjadi kesepakatan antara masyarakat dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Sumatera Selatan untuk mengembangkan skema Kemitraan Konservasi untuk merestorasi lahan-lahan kritis di dalam Kawasan SM Dangku dengan kombinasi tanaman hutan dan MPTS. Untuk tahap awal direncanakan akan direstorasi lahan kritis seluas 80 ha. Kegiatan ini juga dapat dikembangkan dan dikolaborasikan dengan penggunaan Dana Reboisasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, misalnya dalam dukungan pembuatan embung.

Sebagai sebuah upaya restorasi lahan kritis atau lahan terdegradasi kegiatan ini akan menghasilkan perbaikan tutupan lahan sehingga akan menurunkan luasan lahan kritis di dalam kawasan Suaka Marga Satwa Dangku.

3.4.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Rehab DAS

Program Rehab DAS yang dikembangkan oleh Dinas Kehutanan, BP DAS, dan juga perusahaan perusahaan yang mempunyai kewajiban menjalankannya memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat untuk menjadi supplier bibit. Namun dalam hal ini dibutuhkan proses peningkatan kemampuan masyarakat dalam hal memproduksi

bibit ini. Oleh karena itu perlu pemberdayaan masyarakat agar dapat terlibat dalam program ini. Masyarakat dapat terlibat melalui kelompok tani maupun dengan pengembangan usaha BUMDesa. Diharapkan kegiatan ini akan menambah peluang pekerjaan bagi masyarakat yang hidup di dalam kawasan hutan.

3.4.3. Monitoring Sempadan Sungai Secara Partisipatif

Inisiatif ini akan mencoba mengembangkan keterlibatan parapihak dalam hal memonitoring kondisi sempadan sungai. Meskipun demikian partisipasi parapihak ini akan dipandu oleh OPD yang mempunyai tupoksi di bidang ini, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin atau Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengembangkan skema ini akan dilakukan proses sebagai berikut:

- Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pembentukan Tim Multipihak
- Penentuan segmen sungai yang akan diawasi
- Penentuan metode monitoring
- Monitoring lapangan
- Perumusan hasil dan rekomendasi

Output dari kegiatan ini adalah adanya peta kondisi sempadan sungai dan rencana pengelolaannya atau rehabilitasinya.

4. PETA PERAN DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA AKSI KOLABORATIF PADA AREA MODEL 1

Di Area model 1 telah berkembang berbagai inisiatif program dan kegiatan yang dikembangkan oleh berbagai pihak. Untuk mengembangkan keterpaduan dan sinergi parapihak di Area model 1 penting kiranya untuk mengetahui peta peran dan inisiatif parapihak di Area model 1. Berikut ini informasi terkait dengan inisiatif parapihak di Area model 1 berdasarkan program prioritas pada desa-desa intervensi di Area model 1.

Tabel 4.1. Peta Inisiatif Parapihak Pada Desa-Desa Di Area model 1

Topik	Lubuk Bintialo	Pangkalan Bulian	Sako Suban	Dawas
Perbaikan Aspek Kependudukan	ZSL: Studi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam program pemulihan ekosistem partisipatif di blok Sungai Petai, SM Dangku			BKSDA Sumsel & ZSL: Pendataan asal usul perambah melalui sensus di S Petai SM Dangku
Pengurusan aspek lahan legal	ZSL-Puter Pemetaan desa dan perencanaan tata guna lahan, Profiling Desa, Perhutanan Sosial HaKI: Assessment konflik dan fasilitasi resolusinya	ZSL-Puter : Pemetaan desa dan perencanaan tata guna lahan, Profiling Desa HaKI: Assessment konflik dan fasilitasi resolusinya.	ZSL-Puter: Pemetaan desa dan perencanaan tata guna lahan, Profiling desa HAKI: Fasilitasi usulan Perhutsos, skema kemitraan masyarakat Sako Suban dengan PT REKI (IUPHHK-RE ±100ha)	HaKI: Assessment konflik dan fasilitasi resolusinya ZSL Bekerjasama dengan BKSDA Sumsel : Pengembangan kemitraan konservasi di blok sungai Petai SM Dangku kepada KSDAE-KLHK
Rehabilitasi lahan dan konservasi Ekosistem	Perusahaan : kewajiban Rehabilitasi DAS dan lahan kritis (mengoptimalkan kebijakan tentang tanaman kehidupan)	Perusahaan/swasta: kewajiban Rehabilitasi DAS dan lahan kritis	Perusahaan/swasta: kewajiban Rehabilitasi DAS dan lahan kritis	ZSL Bekerjasama dengan BKSDA Sumsel : Pengembangan kemitraan konservasi di blok sungai Petai SM Dangku kepada KSDAE-KLHK
Penguatan Penghidupan Masyarakat Desa Hutan	SNV: Penguatan akses pasar petani karet ZS-Puter: Pengembangan usaha madu ZSL:Pendampingan Usaha Kelompok Perhutsos (pembibitan) Program CSR perusahaan sekitar Pemdes: alokasi Dana Desa untuk pelatihan ataupun pengadaan alat produksi	SNV: Pendampingan kelompok untuk pengembangan pasar karet ZSL+Puter: Pengembangan komoditas madu hutan (sialang) Program CSR perusahaan sekitar Pemdes: alokasi Dana Desa untuk pelatihan ataupun pengadaan alat produksi	HAKI: demplot agroforestri 2 ha (biaya di luar KS) Program CSR perusahaan sekitar Pemdes: alokasi Dana Desa untuk pelatihan ataupun pengadaan alat produksi	SNV: Pelatihan <i>Best Management Practices</i> dan Penguatan Akses Pasar Program CSR perusahaan sekitar ZSL: Penyediaan jenis komoditas HHBK alternatif bagi anggota kelompok tani konservasi di blok Sungai Petai, SM Dangku

	Pemdes: alokasi Dana Desa untuk pelatihan ataupun pengadaan alat	Pemdes: alokasi Dana Desa untuk pelatihan ataupun pengadaan alat		Pemdes: alokasi Dana Desa untuk pelatihan ataupun pengadaan alat produksi Pemdes: alokasi Dana Desa untuk pelatihan ataupun pengadaan alat
--	--	--	--	---

Peran perusahaan juga sangat penting dalam hal membangun desa-desa hutan dan mengembangkan tata-kelola hutan yang baik. Peran mereka dalam membuka lapangan pekerjaan dan mengembangkan program-program *Corporate Social Responsibility* juga sangat berarti dalam mewujudkan cita-cita lanskap yang berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa perusahaan yang berada di sekitar desa-desa di Area model 1.

Tabel 4.2. daftar perusahaan di sekitar desa-desa pada Area model 1

Lubuk Bintialo	Pangkalan Bulian	Sako Suban	Dawas
Sentosa Bahagia Bersama, Conoco Phillip, Wahana Agro Mulia, Bumi Persada Permai II,	Sentosa Bahagia Bersama, Pinago Utama, Bumi Persada Permai I,	REKI, Sentosa Bahagia Bersama, Bumi Persada II	BSS, PPKS, MBI,

Pemetaan parapihak juga dilakukan dengan berdasarkan dari rencana aksi kolaboratif yang ditetapkan. Rapat kerja Forum Dangku Meranti Meskipun informasi diatas mungkin belum detail dan belum lengkap namun dapat digunakan untuk memetakan pihak-pihak mana saja yang perlu bersinergi di Area model 1. Selanjutnya juga sudah dipetakan pihak-pihak terkait yang akan berkolaborasi dalam setiap rencana aksi. Berikut ini adalah peta parapihak di Area model 1 berdasarkan rencana aksi yang akan dikembangkan.

Tabel 4.3. Parapihak Pada Program Prioritas I: Perbaikan Aspek Kependudukan Dan Pendidikan Masyarakat Desa Hutan

Rencana Aksi	Pihak Kunci	Dinamisator	Parapihak
Perbaikan data administrasi kependudukan	Dukcapil, Kecamatan, Pemdes, KPH, Dinas Sosial	ZSL/manajer institusi	SNV, Dukcapil, Dinsos, Dinas PMD, BKSDA, Perusahaan, Dinas Pendidikan, KPH, Yayasan Depati,
Inovasi fasilitas pendukung pendidikan	Dinas Pendidikan, KPH, Perusahaan, Pemdes		
Pemetaan keberadaan Suku Anak Dalam di AM 1	Dinas Sosial, Yayasan Depati, Pemdes terkait, KPH		

Tabel 4.4. Parapihak Pada Program Prioritas 2:Pengurusan Akses Lahan Legal Masyarakat Desa Hutan

Rencana Aksi	Parapihak	Dinamisator	Anggota
Penetapan batas wilayah administratif desa	TPPBD, ZSL-Puter, Bappeda, Kecamatan, KPH, Pemdes	Bappeda Kab Musi Banyuasin	Dinas PMD, Tapal Batas Setda Muba, KPH, Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, BKSDA, Pokja PPS, Dinas PUTR, Satgas P2KA, BPKH Wilayah II, Kecamatan, Pemdes, ZSL, Puter, HAKI, Perusahaan
Community Land Use Planning (CLUP)	Dinas PMD, kelompok masyarakat, Pemdes, Puter		
Integrasi pengembangan Perhutanan Sosial dengan Tata Kelola Desa	Dinas PMD, Dinas Pertanian, Kelompok Perhutsos, Pemdes, KPH, ZSL		

Tabel 4.5. Parapihak Pada Program Prioritas 3: Penguatan Penghidupan Masyarakat Desa Hutan

Rencana Aksi	Parapihak	Dinamisator	Anggota
Pengembangan demplot pola agroforestry pada KPH Meranti sebagai media belajar petani	Dinas Pertanian, Kelompok Perhutsos, Pemdes, KPH, Perusahaan, ZSL	KPH Meranti	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, BPHP, Pokja PPS, Kelompok Perhutsos (KUD Tunggal Karya Sehati, Gapoktan Meranti Wana Makmur) Perusahaan, SNV, APhi, GAPKI, ZSL-livelihood,
Pengembangan usaha perlebahan rakyat	Dinas perindustrian dan koperasi, KPH, ZSL, kelompok masyarakat		
Peningkatan harga karet melalui perbaikan rantai pasok	kelompok tani, SNV, Dinas Perkebunan, perusahaan, Balai Penelitian Sembawa		

Tabel 4.6. Para pihak pada Program Prioritas 4: Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Sungai Secara Partisipatif

Rencana Aksi	Parapihak	Dinamisator	Anggota
Kemitraan Konservasi Untuk restorasi SM Dangku	BKSDA Sumsel, Pemdes Dawas, ZSL	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel	BPDAS, Balai Perbenihan Tanaman Hutan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas LH Kab Muba, Forum DAS, ZSL-konservasi, Perusahaan (Conoco, Medco, PLN, Tropic Energi), Perusahaan HTI,
Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehab DAS	BPDAS, BPTH, kelompok Perhutsos, Pemdes, ZSL		
Monitoring Pencemaran Sungai Secara Partisipatif	KPH, BKSDA, BPDAS, Pemdes		

5. INDIKATOR KINERJA LANSKAP BERKELANJUTAN PADA AREA MODEL 1

Berbagai program prioritas dan rencana aksi kolaboratif di Area model 1 akan diarahkan mencapai indikator kinerja lanskap berkelanjutan. Indikator-indikator kinerja lanskap berkelanjutan ini telah disusun pada dokumen Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku 2018-2018. Dilihat dari Program Prioritas dan Renaca Aksi Kolaboratif yang diuraikan pada Bab 3 maka dapat disusun indikator kinerja lanskap berkelanjutan di Area model 1 sebagaimana table berikut ini:

Tabel 5.1. Indikator Kinerja Lanskap dan Indikator SDG'S pada Pengembangan Program dan Aksi Kolaboratif di Area Model 1

PROGRAM PRIORITAS	RENCANA AKSI KOLABORATIF	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA LANSKAP BERKELANJUTAN YANG DITUJU	Kontribusi ke Tujuan SDG
Perbaikan aspek kependudukan dan Pendidikan masyarakat desa hutan	Pendampingan Pembuatan KK dan KTP	Jumlah Penduduk yang mendapatkan KK	1. Jumlah penduduk yang terakses sistem perlindungan sosial desa 2. Jumlah desa yang memiliki profil desa yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Kemiskinan (1) • Kesehatan dan Kesejahteraan (3) • Kesetaraan Gender (5) • Mengurangi Kesenjangan (10) • Keberlanjutan Kota dan Komunitas (11)
	Inovasi Penyediaan Fasilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP, dan SLTA	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Berkualitas (4) • Mengurangi Kesenjangan (10)
Pengurusan akses lahan legal masyarakat desa hutan	Pemetaan Batas Desa	Peta Desa Resmi	Jumlah desa yang memiliki profil yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Kesenjangan (10) • Keberlanjutan Kota dan Komunitas (11)
	Pemetaan Tata Guna Lahan Desa	Data spasial desa		
	Pengurusan Legalitas Lahan Kelola Melalui Perhutanan Sosial	Jumlah luas lahan legal yang diakses (ha)	Jumlah izin kepemilikan lahan legal masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi kesenjangan (10) • Kemitraan untuk mencapai tujuan (17)
Penguatan penghidupan masyarakat desa hutan	Demplot Agroforestry dan Integrated Farming	Jenis Usaha Tani Baru	1. Jumlah usaha baru yang	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan

			produktif, serapan tenaga kerja, 2. Omzet usaha, tingkat keuntungan	Pekerjaan yang Layak (8) <ul style="list-style-type: none"> • Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (9) • Mengurangi Kesenjangan (10)
	Pengembangan HHBK Madu Klulut	Jenis Usaha Baru	3.	•
	Perbaikan akses pasar komoditi utama	Peningkatan Pendapatan Petani	Pendapatan anggota kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10)
Rehabilitasi lahan dan konservasi sungai secara partisipatif	Restorasi Kawasan SM Dangku Secara Partisipatif	Luasan kawasan konservasi yang terestorasi	Luas ekosistem terestorasi	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi terhadap iklim (13) • Kehidupan di darat (16)
	Pemverdayaan Masyarakat dalam Rehab DAS	Peningkatan pendapatan petani	1. Jumlah usaha baru yang produktif, serapan tenaga kerja, 2. Luas lahan terehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (9) • Mengurangi kesenjangan (10) • Aksi terhadap iklim (13) • Kehidupan di darat (16)
	Monitoring Sempadan Sungai Secara Partisipatif	panjang sempadan sungai yang dikelola dengan baik	1. Luas sempadan sungai dan rawa yang terlindungi 2. Luas lahan terehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (12) • Kehidupan di darat (16) • Aksi terhadap iklim (13) • Kehidupan di darat (16)

